

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN SEKTOR UNGGULAN DKI
JAKARTA UNTUK *REBOUND* EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

Oleh

Decky Subarja

Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta

Email: decky.subarja@stialan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengukur ketimpangan pembangunan dan sektor unggulan Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan merupakan data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2020 – 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Pemilihan periode waktu tersebut dikarenakan pada tahun tersebut, Indonesia dilanda Pandemi Covid-19, dimana Pandemi tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur ketimpangan pembangunan menggunakan analisis Williamson dan analisis Entrophy Theil. Sedangkan untuk mengukur sektor unggulan di kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta menggunakan analisis Shift Share, Tipologi Klassen, Location Quotient dan Dynamic Location Quotient. Hasil pengukuran menunjukkan taraf kesenjangan ekonomi Provinsi DKI Jakarta relatif rendah. Provinsi DKI Jakarta juga memiliki sektor unggulan sekaligus menjadi sektor potensial di masa mendatang pada masing-masing kota kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kata Kunci: Sektor Unggulan, Analisis *Shift Share*, Tipologi Klassen, *Location Quotient*, DKI Jakarta

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memberikan guncangan masif di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang terdampak terbesar Pandemi Covid-19 yaitu DKI Jakarta. Sebanyak 1,141 Juta penduduk DKI Jakarta terkonfirmasi positif Covid-19 yang merupakan jumlah tertinggi di Indonesia dan sebesar 14,91% tenaga kerja terdampak akibat Pandemi Covid-19. Selain itu, kontraksi pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya DKI Jakarta juga disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Secara nasional, menurut data Badan Pusat Statistik yang disadur oleh Kementerian Keuangan, pada tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07 persen. Sedangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II 2020 mengalami

kontraksi sedalam -8,23 persen dan pada triwulan III 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,82 persen.

Kemudian, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku pada triwulan III 2020 menurut lapangan usaha mengalami kontraksi sebesar -3,82 persen (y-on-y) dibandingkan triwulan III 2019. Sektor Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi yang paling dalam (-16,38 %), kemudian disusul industri pengolahan (-12,03 %), pengadaan listrik, gas (-10,60 %), perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor (-9,91 %) serta transportasi dan pergudangan (-8,26 %).

Meskipun demikian, permasalahan pemerintah bukan hanya upaya untuk *rebound* ekonomi pasca Pandemi Covid-19 namun juga upaya untuk pemerataan kesejahteraan melalui

pembangunan di Indonesia. Meskipun pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi dilakukan secara masif di DKI Jakarta, namun juga terdapat kesenjangan. Kesenjangan yang besar di DKI Jakarta khususnya di Kabupaten Pulau Seribu (Munandar and Handayani, 2023). Kemudian, Nur and Rakhman (2019) menyimpulkan bahwa kesenjangan yang besar di DKI Jakarta khususnya di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Sejatinya, tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sasaran kebijakan pembangunan regional yaitu mewujudkan kemakmuran wilayah dan kemakmuran masyarakatnya (Sjafrizal, 2008). Oleh karena itu, pembangunan seharusnya dapat mewujudkan gap ekonomi antar daerah di Kabupaten/ Kota maupun antar provinsi yang lebih sempit. Lebih lanjut, dalam mengakselerasi capaian pembangunan maka perlu adanya suatu kebijakan untuk mendorong sektor unggulan sehingga dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusinya terhadap total PDRB, pembangunan sektor unggulan dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi (Elsjamina, 2014, dalam Tumangkeng (2018).

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai ketimpangan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta serta mengukur ketimpangan pembangunan di Indonesia dengan menggunakan analisis Index Williamson dan analisis Index Entrophy Theil untuk mengukur kesenjangan Kabupaten/ Kota Provinsi DKI Jakarta maupun kesenjangan antarprovinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan memaparkan sektor unggulan di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan analisis *Shift Share*, Tipologi Klassen, *Location Quotient* dan *Dynamic Location Quotient* dengan menggunakan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Pengukuran terhadap sektor unggulan di DKI Jakarta dimaksudkan sebagai

upaya pemilihan strategi dalam mendorong pertumbuhan atau *rebound* ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

LANDASAN TEORI

Beberapa teori digunakan dalam penelitian ini seperti teori Produk Domestik Regional Bruto yang dikemukakan oleh Miroah (2015) dan juga teori pembangunan ekonomi daerah yang dikemukakan oleh (Tikson, 2005; Afandi, 2021) yang secara umum mengutarakan bahwa pembangunan merupakan upaya dari suatu kebijakan dan strategi menuju arah tranformasi dalam struktur ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi nasional juga tidak terlepas dari kontribusi pembangunan daerah. Pembangunan nasional merupakan fungsi dan agregasi dari pembangunan daerah, apabila ekonomi di daerah maju dan berkembang maka ekonomi nasional juga akan maju dan berkembang.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Adapun pengukuran analisis ketimpangan menggunakan perhitungan indeks Williamson dan indeks Entrophy Theil. Menurut Sjafrizal (2008), indeks Williamson merupakan alat analisis yang digunakan untuk menguji disparitas regional dengan tingka pembangunan ekonomi. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 fi/n}}{Y}$$

Keterangan:

Y_i : PDRB perkapita di Kabupaten/ Kota Provinsi DKI Jakarta

Y : PDRB perkapita rata-rata di Provinsi DKI Jakarta

f_i : jumlah penduduk di Kabupaten/ Kota Provinsi DKI Jakarta

n : jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan, indeks Entrophy Theil menurut Sirtama (2021) merupakan teori informasi yang digunakan untuk mengukur

kesejangan ekonomi dan juga dalam mengukur konsentrasi industri pada suatu wilayah. Lebih dari itu, indeks tersebut jga dapat mendeskripsikan pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$I(y) = \sum (y_j/Y) \times \log[(y_j/Y)/(x_j/X)]$$

Keterangan:

Y_j : PDRB perkapita di Kabupaten/ Kota Provinsi DKI Jakarta

Y : Rata-rata PDRB perkapita di Provinsi DKI Jakarta

X_j : Jumlah penduduk di Kabupaten/ Kota Provinsi DKI Jakarta

X : Jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta

Kemudian, secara teori analisis *shift share* merupakan salah satu model pertumbuhan ekonomi wilayah yang juga bertujuan untuk mengetahui faktor penentu pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tersebut. (Sjafrizal, 2014). Adapun perhitungan analisis *shift share* menggunakan formula sebagai berikut:

$$\Delta y_i = \left[y_i \left(\frac{Y^t}{Y^0} - 1 \right) \right] + \left[y_i \left(\frac{Y_i^t}{Y_i^0} \right) - \left(\frac{Y^t}{Y^0} \right) \right] + \left[y_i \left(\frac{y_i^t}{y_i^0} \right) - \left(\frac{Y_i^t}{Y_i^0} \right) \right]$$

Keterangan:

Δy_i = peningkatan nilai tambah sektor

y_i^0 = nilai tambah sektor i di tingkat daerah pada tahun awal periode

y_i^t = nilai tambah sektor i di tingkat daerah pada akhir periode

Y_i^0 = nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada awal periode

Y_i^t = nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada akhir periode.

Selain itu, Tipologi Klassen juga biasa digunakan untuk mempermudah analisa secara spasial terlebih lagi untuk mengetahui karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah (Soebyakto and Bashir, 2015).

Metode penentuan sektor unggulan yang juga biasa digunakan adalah *Location Quotient* merupakan tingkat perbandingan suatu wilayah dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensinya), dimana wilayah yang diamati merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas tersebut. misalnya, ukuran konsentrasi satu sektor di suatu provinsi dibandingkan dengan sektor tersebut untuk tingkat nasionalnya (Ghalib, 2005). Demikian pula ukuran konsentrasi satu sektor pada tingkat kabupaten/kota dibandingkan dengan sektor tersebut untuk tingkat provinsinya Sedangkan, *Dynamic Location Quotient* (DLQ) merupakan analisis yang digunakan untuk penentuan sektor bisnis yang akan terjadi pada masa yang akan datang pada sektor potensial (Suyatno, 2000).

$$LQ = \frac{(X_{ir}/X_r)}{(X_{in}/X_n)}$$

Keterangan:

X_{ir} = PDRB sektor ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta

X_r = Jumlah PDRB sektor ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi DKI Jakarta

X_{in} = PDRB sektor ekonomi di Provinsi DKI Jakarta

X_n = Jumlah PDRB sektor ekonomi di Provinsi DKI Jakarta

$$DLQ = \frac{1 + g_{ij} / 1 + g_j}{1 + G_i / 1 + G_j}$$

Keterangan:

g_{ij} : rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi di Kabupaten/ Kota

g_j : rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota

G_i : rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi di Provinsi

G_j : rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hasil perhitungan indeks Williamson menunjukkan bahwa taraf kesenjangan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta

relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks pada tahun 2020 sebesar 0,25, kemudian di tahun 2021 sebesar 0,24, lebih lanjut di tahun 2022 sebesar 0,24. Taraf kesenjangan ekonomi Provinsi DKI Jakarta lebih baik dibandingkan taraf kesenjangan ekonomi secara nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki kecenderungan sebagai pusat perekonomian nasional. Berikut tabel perhitungan ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia Tahun 2020 – 2022:

Tahun	Provinsi DKI Jakarta	Termasuk DKI Jakarta	Diluar DKI Jakarta
2020	0,25	0,75	0,39
2021	0,24	0,73	0,41
2022	0,24	0,72	0,45

Sumber: BPS (diolah)

Kemudian, dalam mengaplikasikan konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri dapat menggunakan konsep Entrophy Theil (Kuncoro, 2001). Berdasarkan perhitungan indeks Entrophy Theil di wilayah Provinsi DKI Jakarta periode 2020 – 2022 tidak ditemukan adanya kecenderungan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan kota di Provinsi DKI Jakarta yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan karena pusat pemerintahan berada di Jakarta Pusat sehingga mobilitas masyarakat berpusat pada kota administrasi tersebut.

Selanjutnya, menurut Tarigan (2014), analisis *shift share* digunakan untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan sektor atau industri di wilayah yang sempit disebut daerah dengan wilayah yang lebih luas disebut nasional. Analisis *Shift Share* yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan PDRB DKI Jakarta dengan PDRB Nasional. Berdasarkan pengolahan data pada masing-masing sektor lapangan usaha di tahun awal 2020 dan tahun akhir 2022 dengan menggunakan analisis *Shift Share* didapatkan hasil bahwa pergeseran bersih pada sektor-

sektor lapangan usaha di Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai positif kecuali pada sektor pertambangan dan penggalan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor jasa perusahaan. Hampir seluruh sektor di Provinsi DKI Jakarta diperkirakan bertumbuh relatif cepat kecuali sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya. Hal ini dapat menjadi pemicu akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Adapun sektor unggulan di Provinsi DKI Jakarta antara lain sektor real estate, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor industri pengolahan. Berikut adalah tabel perhitungan analisis *shift share*:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share*

Lapangan Usaha	Nj	Nj	Cj	Dj
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	527.412,4322	78.421,3882	-41.785,5743	564.048,2460
Pertambangan dan Penggalan	1.094.473,8268	1.542.056,6941	-1.152.534,6878	-535.004,1670
Industri Pengolahan	74.243.355,3923	12.673.781,9266	22.791.566,1177	109.709.703,4366
Pengadaan Listrik dan Gas	2.172.109,6092	301.293,1690	-1.011.624,5862	-538.221,8080
Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	218.131,0743	23.789,2713	-41.917,5059	199.961,8397
Konstruksi	73.795.167,8093	11.623.857,4716	-10.441.816,2963	74.977.208,9846
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	108.470.577,8584	28.428.967,9625	-25.384.477,8982	111.735.067,9238
Transportasi dan pergudangan	22.773.314,7487	9.708.990,0736	-10.779.603,8298	21.702.700,9925
Penyediaan akomodasi dan makan minum	27.131.222,2152	5.371.094,5046	5.782.713,1166	38.285.029,8364
Informasi dan komunikasi	60.840.312,8568	10.214.460,1879	-7.248.053,5876	63.806.739,4571
Jasa keuangan dan asuransi	73.642.567,4632	11.985.128,8766	-177.064,2673	-91.436.570,9624
Real estate	41.079.119,3979	3.125.873,4782	84.020.299,8490	128.225.152,7291
Jasa perusahaan	57.795.284,8942	9.264.930,4814	-142.108.782,5063	-74.048.567,1307
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	34.645.919,5450	1.132.691,4478	-2.406.613,9911	33.371.996,9997
Jasa pendidikan	34.201.149,7820	8.504.971,6823	-51.784.295,0824	30.921.926,6629
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	13.845.533,9471	-2.733.440,6452	23.853.611,7918	34.966.705,0938
Jasa lainnya	25.848.075,0722	-10.224.327,3462	62.959.646,4184	77.583.404,1444

Sumber: BPS (diolah)

Tipologi *Klassen* digunakan untuk mempermudah analisa secara spasial terlebih lagi untuk mengetahui karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah (Soebyakto and Bashir, 2015). Berdasarkan hasil pengolahan data pada masing-masing sektor lapangan usaha di Provinsi DKI Jakarta dengan membandingkan pada sektor lapangan usaha di Indonesia maka didapatkan sektor lapangan usaha pada kuadran satu adalah sektor real estate dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, kedua sektor tersebut merupakan sektor maju dan diperkirakan tumbuh pesat. Sedangkan sektor lapangan

usaha pada kuadran kedua adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor tersebut dinilai memiliki potensi atau masih dapat berkembang pesat. Berikut adalah posisi masing-masing lapangan usaha di Provinsi DKI Jakarta pada kuadran tipologi Klassen.

Tabel 2. Kuadran Tipologi Klassen

Sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran 1)	Sektor maju tapi tertekan (kuadran 3)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sektor real estate ▪ Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transportasi dan pergudangan
Sektor potensial atau masih dapat berkembang (kuadran 2)	Sektor relatif tertinggal (kuadran 4)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi ▪ Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor ▪ Informasi dan komunikasi ▪ Jasa keuangan dan asuransi ▪ Jasa perusahaan ▪ Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian, kehutanan dan perikanan ▪ Pertambangan dan penggalian ▪ Industri pengolahan ▪ Pengadaan listrik dan gas ▪ Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa pendidikan ▪ Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial ▪ Jasa lainnya 	
---	--

Sumber: BPS (diolah)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan basis ekonomi dengan membandingkan antara skala wilayah yang lebih luas dan skala yang lebih kecil pada kriteria kontribusi tertentu. analisis LQ memiliki standar nilai koefisien, dimana apabila $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan memiliki potensi untuk meningkatkan daerahnya. Sedangkan sebaliknya, apabila $LQ < 1$ maka sektor tersebut bukanlah sektor unggulan. sebab outputnya hanya mampu dikonsumsi di wilayah yang bersangkutan. Selain LQ, juga terdapat analisis lainnya yang serupa yaitu *Dynamic Location Quotient* (DLQ), adapun standar nilai koefisien, dimana apabila $DLQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor potensi. Menurut (Jafar and Meilvidiri (2021), analisis DLQ digunakan untuk mengakomodasi faktor laju pertumbuhan output sektoral ekonomi per periodik.

Berdasarkan hasil pengolahan data PDRB Tahun 2020 – 2022 Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/ Kota di dalam wilayah provinsi tersebut melalui unduhan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan $LQ > 1$ yang merupakan sektor unggulan di daerah tersebut. Adapun hasil pengolahan data tersebut didapatkan pada Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki sektor unggulan menurut analisis LQ yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan analisis DLQ menunjukkan hal yang berbeda, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tidak potensi dan selain kedua sektor tersebut adalah sektor yang memiliki potensi.

Kemudian, Kota Administrasi Jakarta Selatan sektor unggulannya menurut analisis

LQ antara lain sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya. Sedangkan analisis DLQ menunjukkan sektor yang memiliki potensi antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya.

Selanjutnya, di Kota Administrasi Jakarta Barat, sektor unggulan di wilayah tersebut menurut analisis LQ antara lain sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan, berdasarkan analisis DLQ, sektor yang memiliki potensi antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, sektor jasa pendidikan, sektor kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya.

Sektor unggulan di Kota Administrasi Jakarta Timur menurut analisis LQ antara lain sektor industri pengolahan, sektor pengadaan

listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan, menurut analisis DLQ, sektor yang memiliki potensi antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan makanan dan minuman, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa lainnya.

Lebih lanjut, sektor unggulan di Kota Administrasi Jakarta Pusat menurut analisis LQ antara lain sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa pendidikan. Sedangkan, menurut analisis DLQ, sektor yang memiliki potensi antara lain sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa lainnya.

Dan yang terakhir di Kota Administrasi Jakarta Utara, menurut analisis LQ sektor unggulannya antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor transportasi dan pergudangan. Sedangkan menurut analisis DLQ, sektor yang memiliki potensi antara lain

sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; resparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa lainnya. Berikut adalah tabel sektor unggulan berdasarkan analisis LQ dan sektor potensi berdasarkan analisis DLQ.

Tabel 3. Sektor Unggulan dan Potensial Kota di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022

Lapangan Usaha	Kep Seribu		Jakarta Selatan		Jakarta Barat		Jakarta Timur		Jakarta Pusat		Jakarta Utara	
	Sektor Unggulan	Potensial										
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	67.15	1.00	0.70	1.00	0.91	1.00	0.88	1.00	0.09	1.00	1.84	1.00
Perdagangan dan Perdagangan	389.98	1.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	0.26	1.02	0.12	1.03	0.46	1.00	2.27	1.00	0.07	1.02	2.67	1.00
Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	1.01	0.39	1.00	0.80	1.00	1.89	1.00	0.98	1.00	4.18	1.84
Pengadaan air, pengelabian sampah, limbah dan daur ulang	0.87	1.00	0.72	1.00	1.17	1.00	1.49	1.00	0.37	1.00	1.50	1.00
Konstruksi	0.17	1.00	0.88	1.00	1.19	1.00	0.83	1.00	0.73	1.00	1.24	1.00
Perdagangan besar dan eceran, Resparasi mobil dan sepeda motor	0.24	1.01	0.91	1.00	1.08	1.00	0.99	1.00	0.84	1.00	1.02	1.00
Transportasi dan pergudangan	0.08	1.01	0.60	1.01	1.40	1.01	1.34	0.99	0.59	1.01	1.27	1.01
Penyediaan akomodasi dan makan minum	0.58	1.01	0.87	1.00	1.08	1.00	0.88	1.00	1.10	1.00	0.92	1.00
Informasi dan komunikasi	0.06	1.00	1.33	1.00	1.87	1.00	0.59	1.00	0.86	1.00	0.23	1.00
Jasa keuangan dan asuransi	0.03	1.35	1.59	1.31	0.82	1.31	0.20	1.30	2.72	1.31	0.19	1.31
Real estate	0.23	1.09	1.10	1.10	0.97	1.10	0.73	1.10	0.83	1.10	0.79	1.10
Jasa perusahaan	0.95	1.28	1.70	1.30	1.03	1.30	0.84	1.29	1.42	1.30	1.00	1.29
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0.24	1.00	1.34	1.00	0.30	1.00	0.74	1.00	1.65	1.00	0.33	1.00
Jasa pendidikan	0.12	1.00	0.63	1.00	1.05	1.00	1.40	1.00	1.84	1.00	0.69	1.00
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0.65	1.01	1.12	1.00	1.09	1.00	1.02	1.00	0.95	1.00	0.77	1.00
Jasa Lainnya	0.32	1.00	1.45	1.00	0.84	1.00	0.75	1.00	0.89	1.00	0.85	1.00

Sumber: BPS (diolah)

Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis korelasi pearson dengan menggunakan aplikasi SPSS didapatkan bahwa LQ di Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Utara memiliki hubungan yang signifikan dengan DLQ, yang artinya apabila sektor unggulan LQ di keempat kota tersebut ditingkatkan maka akan berpengaruh pada sektor unggulan di masa mendatang (DLQ). Sedangkan, LQ di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Timur tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan DLQ. Hal ini merupakan kebalikan dari sebelumnya, dimana LQ di kedua wilayah tersebut tidak memiliki hubungan dengan sektor unggulan di masa mendatang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil data menggunakan analisis Indeks Williamson maka dapat

disimpulkan bahwa taraf kesenjangan ekonomi dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 relatif rendah. Berdasarkan indeks tersebut dapat diketahui adanya kecenderungan pusat pembangunan berada di Provinsi DKI Jakarta, hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran masing-masing wilayah dengan menggunakan metode dekomposisi. Begitu pulan hasil pengukuran dengan indeks Entrophy Theil yang menunjukkan tidak ada kecenderungan ketimpangan ekonomi yang lebih besar di Kabupaten/ Kota DKI Jakarta dalam kurun waktu yang sama. Namun demikian, apabila dibandingkan antarprovinsi, maka terdapat kecenderungan ketimpangan pembangunan.

Kemudian, hasil analisis data pada masing-masing lapangan usaha periode 2020 - 2022 dengan menggunakan shift share menunjukkan bahwa adanya pergeseran bersih pada sektor-sektor lapangan usaha di Provinsi DKI Jakarta. Hampir seluruh sektor di Provinsi DKI Jakarta diperkirakan bertumbuh relatif cepat sehingga hal ini akan memudahkan bagi stakeholder untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Sektor unggulan seperti sektor real estate, sektor perdagangan besar dan eceran; resparasi mobil dan sepeda motor serta sektor industri pengolahan tetap bertahan menjadi sektor unggulan Provinsi DKI Jakarta meskipun dilanda Pandemi Covid-19.

Selanjutnya, dalam menganalisa sektor unggulan Provinsi DKI Jakarta, dilakukan dengan menggunakan analisis tipologi Klassen. Data yang diolah merupakan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2020 – 2022 di Provinsi DKI Jakarta. Hasil menunjukkan Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) sektor unggulan yaitu sektor real estate dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain itu, juga terdapat beberapa sektor potensial atau masih dapat berkembang serta sektor maju tapi tertekan. Banyaknya sektor-sektor yang maju dan potensial di Provinsi DKI Jakarta yang didominasi oleh sektor jasa dan sektor-sektor padat karya berpotensi untuk peningkatan penyediaan lapangan kerja. Dampak Pandemi

Covid-19 yang berdampak pada ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta seharusnya dapat ditanggulangi dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut sehingga lapangan kerja lebih tersedia bagi tenaga kerja.

Lebih lanjut, analisis sektor unggulan dengan menggunakan LQ dan DLQ menunjukkan pada tiap kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta memiliki sektor unggulan dan sektor potensial. Sektor unggulan merupakan sektor atau komoditas yang memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan namun juga dapat di ekspor ke luar wilayah. Sedangkan sektor potensial merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk menjadi sektor basis pada periode selanjutnya. Sektor yang menjadi sektor unggulan dan sektor potensial di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara lain sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor lainnya. Kemudian, sektor yang menjadi sektor unggulan dan sektor potensial di Kota Administrasi Jakarta Barat antara lain sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Selanjutnya, sektor yang menjadi sektor unggulan dan sektor potensial di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Sedangkan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sektor unggulan dan sektor potensial, antara lain sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa pendidikan. Dan yang terakhir,

sektor unggulan dan sektor potensial di Kota Administrasi Jakarta Utara antara lain sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa perusahaan. Dengan adanya sektor unggulan sekaligus menjadi sektor potensial, hal ini menandakan adanya kecenderungan sektor unggulan, yang saat ini memiliki keunggulan dan nilai tambah dibandingkan komparatifnya, diperkirakan tetap menjadi sektor unggulan di masa mendatang dan sektor tersebut cenderung akan memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan perekonomian Provinsi DKI Jakarta.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti kepada para *stakeholder* antara lain:

1. Pemerintah Pusat

- a) Ketimpangan pembangunan di tingkat provinsi berkaitan langsung dengan ketimpangan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota sehingga perlu adanya pengambilan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Keberhasilan pembangunan daerah akan menghasilkan *tickle down effect* yang akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b) Perlu adanya prioritas investasi ke daerah-daerah guna mengakselerasi pembangunan di daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Andhiani, Erfit and Bhakti (2018) yang menyimpulkan bahwa secara parsial hanya variabel investasi yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, sebaliknya variabel-variabel lainnya yaitu belanja pemerintah, aglomerasi dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan.

Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mendorong kemudahan investasi di daerah.

- c) Ketimpangan pembangunan di tingkat provinsi berkaitan langsung dengan ketimpangan pembangunan pada tingkat kabupaten/ kota. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memperhatikan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota.
2. Pemerintah Daerah
- a) Perlu adanya regulasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor potensial atau masih dapat berkembang serta sektor maju tapi tertekan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar sektor-sektor yang masuk di kuadran 2 dan kuadran 3 dalam Tipologi Klassen dapat berdaya saing dengan daerah lainnya. Kebijakan untuk memfokuskan pada sektor ekonomi yang masuk ke dalam sektor maju dan tumbuh pesat, sektor potensial atau masih dapat berkembang serta sektor maju tapi tertekan akan memberikan keuntungan di masa mendatang.
- b) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan sektor unggulan yang sekaligus menjadi sektor potensial dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor tersebut sehingga diharapkan di masa mendatang, sektor unggulan yang sekaligus menjadi sektor potensial, memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta baik pada saat ini maupun di masa mendatang.
- c) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan dan meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan saat ini yang terdapat di Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Utara karena akan berdampak pada perkembangan sektor

unggulan di masa mendatang pada keempat kota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, M.N. (2021) *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan Atau Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Deepublish.
- [2] Andhiani, K.D., Erfit and Bhakti, A. (2018) 'Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera', *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(1). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4602>.
- [3] Jafar, R. and Meilvidiri, W. (2021) 'Analisa Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ) dan Klasifikasi Carvalho dalam Menentukan Potensi Ekonommi Kabupaten Takalar', *Journal of Regional Economy*, 2(3).
- [4] Kuncoro, M. (2001) *Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [5] Miroah, C. (2015) *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kota Semarang Melalui Pendekatan Tipologi Klassen*. Universitas Negeri Semarang.
- [6] Munandar, T.A. and Handayani, D. (2023) 'Data Mining For Development Inequality', *IAENG International Journal of Applied Mathematics*, 53(2), p. 646. Available at: https://www.iaeng.org/IJAM/issues_v53/issue_2/IJAM_53_2_23.pdf.
- [7] Nur, I. and Rakhman, M.T. (2019) 'Analisis PDRB Sektor Ekonomi Unggulan Provinsi DKI Jakarta', *Indonesian Treasury Review*, 4(4), pp. 351–370. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v4i4.132>.

-
- [8] Sirtama, B.W. (2021) ‘Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pembuktian Hipotesis Kuznets)’, *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(4), pp. 654–664. Available at: <https://doi.org/10.22219/jie.v5i04.17810>.
- [9] Sjafrizal (2008) *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- [10] Sjafrizal (2014) *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- [11] Soebyakto, B.B. and Bashir, A. (2015) ‘Analisis Tipologi dan Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan’, *Jurnal EKonomi Pembangunan*, 13(1), pp. 21–36. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jep.v13i1.4848>.
- [12] Suyatno (2000) ‘Analisis Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri: Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 5/1999’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(2).
- [13] Tarigan, R. (2014) *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [14] Tikson, T.D. (2005) *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang Persada.
- [15] Tumangkeng, S. (2018) ‘Analisis Potensi Ekonomi di Sektor dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Tomohon’, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(1), pp. 127–138. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbi/article/view/20678>.